

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu pelayanan dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambiltan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan optimalisasi keuntungan perusahaan, perusahaan meminimalkan biaya, termasuk beban pajak dengan menghindari pajak. Teori keagenan adalah bahwa pemilik usaha (pemegang saham) memberikan hak untuk menjalankan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kontrak yang disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan harga nilai perusahaan. perusahaan, manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan memegang peran penting bagi para investor, hal ini dikarenakan laporan keuangan memberikan informasi yang penting mengenai perusahaan yang dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang, prospek perusahaan dimasa yang akan datang, serta memiliki nilai yang sangat bagi pengguna dengan mendasarkan pada informasi dari laporan keuangan tersebut. Informasi mengenai laporan keuangan digunakan oleh pihak investor untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan, dengan seiring meningkatnya transfer kekayaan bagi pemegang saham tetap.

Dalam situasi perusahaan menerima keuntungan manajemen perusahaan tersebut akan memberikan sinyal kepada investor agar mendukung kelangsungan posisi manajemen saat ini dan kompensasi yang lebih tinggi dari manajemen. Manajer dan pemegang saham memiliki insentif untuk menaikkan tingkat monitoring dengan mempertinggi pengungkapan informasi tambahan tentang kegiatan perusahaan. Karena pada waktu perusahaan mengalami laba kepercayaan diri manajemen yang semakin besar, manajemen akan secara sukarela menyampaikan laporan keuangannya sesegera mungkin, memberikan informasi segera jika perusahaan berkinerja baik, dan jika kinerja perusahaan buruk pihak manajemen mungkin akan memperpanjang waktu untuk mengumumkan laporan keuangannya atau lebih memilih membatasi akses informasi akuntansi. Keadaan ini menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang disebut asimetri informasi. Ini adalah situasi dimana pemilik perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja manajemen dan tidak dapat mengetahui upaya manajemen untuk menyampaikan kontribusinya terhadap hasil aktual perusahaan. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa pemilik perusahaan serta manajemen mempunyai preferensi atau tujuan yang berbeda dikarenakan semua individu bertindak atas kepentingan individu sendiri.

2.2 Audit Internal

Menurut Johnson & Kell (2010:491), dalam Lestari 2017, "Audit internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi". Menurut Sawyer (2008:9) "Audit internal merupakan fungsi penilaian independen yang

dibentuk dalam sebuah perusahaan guna memeriksa serta menilai aktivitas-aktivitas sebagai jasa yang di berikan kepada perusahaan”.

Menurut Maliawan dan Diatmika, 2017,Audit internal adalah fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas pada suatu organisasi untuk mengevaluasi aktivitas sebagai bentuk pelayanan terhadap organisasi perusahaan.

Pemeriksaan intern untuk melaksanakan aktivitas penilaian dalam organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang -bidang operasi lainnya sebagai dasar pelayanan pada manajemen.

Sujarweni & Wiratna, 2017, Mengemukakan bahwa Efektivitas Pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan. Agoes 2017 mengemukakan bahwa audit internal (pemeriksaan intern) merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku, yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan. Adapun menurut Hery (2010), dalam Putri, *et al* (2021), audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan- kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Berdasarkan dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa audit intenal merupakan sebagai suatu fungsi penilaian independen yang ada dalam organisasi untuk menyelidiki dan menilai kegiatan organisasi sebagai penyedia jasa kepada organisasi perusahaan.

2.2.1 Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal dalam perusahaan adalah untuk membantu manajemen dalam rangka mengendalikan operasi perusahaan agar dapat mencapai tujuan organisasi Dengan ekonomis, efisien dan efektif. Definisi tujuan audit internal menurut Safuan 2017 adalah untuk mengidentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan. Tujuan dari audit internal menurut Arifudin, *et al* 2020, mengemukakan fungsi audit internal, adalah membantu organisasi mempertahankan kontrol internal yang efektif dengan menilai kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan. Dengan kata lain tujuan audit internal ialah untuk menyediakan organisasi dengan layanan yang membantu semua anggota organisasi. Bantuan yang diberikan sebagai tujuan akhir adalah agar semua anggota organisasi dapat melakukan tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif. Menurut Rustendi, 2018, Kegiatan audit internal yang berkaitan dengan jasa audit dan konsultasi dilakukan dengan pendekatan evaluasi dan perbaikan yang sistematis dan terfokus, mengharuskan auditor internal untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kompetensi dan ketelitian profesional. Sejalan dengan pendapat ini menurut Arifudin, 2019 Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, seperti lingkungan kerja, keterampilan karyawan, kesehatan karyawan, kepribadian karyawan, dan

gaya kepemimpinan manajer atau atasan. Independensi dan sikap objektif merupakan dua faktor yang penting dalam keefektifan audit internal. Sehingga setiap audit internal perlu mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, audit internal akan dilaksanakan dengan jujur dan tegas, dan dengan mempertahankan objektivitasnya audit internal akan dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Dalam hal ini juga tentunya dapat mempertahankan dan menambah kepercayaan manajemen. Adapun sasaran dan ruang lingkup daripada audit internal adalah sebagai berikut:

(a) Audit internal harus dapat membantu organisasi untuk memelihara pengendalian intern yang efektif, dengan melakukan evaluasi kecukupan, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dari pengendalian yang dilakukan, (b) Audit internal harus dapat membantu organisasi untuk mengamankan harta kekayaan organisasi, (c) Audit internal harus dapat membantu organisasi untuk memberikan nilai tambah (*Added Value*), Audit internal harus dapat memberikan kegiatan konsultasi (*Consulting Service*) dan jasa keyakinan (*Assurance Service*) kepada organisasi.

2.2.2 Tipe Audit

Terdapat beberapa tipe penugasan audit yang dilakukan oleh auditor internal, yaitu sebagai berikut:

1. Audit Keuangan,

Audit keuangan adalah audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan laporan keuangan baik di tingkat perusahaan pusat/departemen. Dari perspektif manajemen, auditor memastikan bahwa transaksi disetujui, tercermin

dalam catatan akuntansi, dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

2. Audit Non Keuangan

(a) Audit Kepatuhan,

Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas dan atau entitas telah mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dibuat oleh organisasi dan oleh pihak-pihak yang mengikat, misalnya terkait peraturan pemerintah tentang kepatuhan perpajakan, upah minimum, dan lainnya. Auditor biasanya memberi rekomendasi untuk perbaikan dalam pengendalian dan proses yang digunakan untuk mematuhi berbagai peraturan

(b) Audit Kinerja,

Audit kinerja dilakukan untuk menentukan bagaimana suatu entitas unit kerja mengelola penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif dalam memenuhi tujuan entitas serta misi. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud meliputi prosedur, proses dan kinerja personel yang melaksanakan fungsi pengelolaan tersebut.

(c) Tinjauan Struktur Pengendalian Internal,

Tujuan audit adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas, keandalan proses pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan perlindungan aset unit kerjanya. Audit ini dilakukan sebagai bagian dari audit keuangan entitas yang telah menyusun laporan keuangan dan dilakukan secara eksklusif untuk entitas yang tidak harus menyusun laporan keuangan.

(d) Audit Pengadaan,

Audit pengadaan merupakan salah satu fungsi audit intern yang memantau pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan entitas. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal meliputi seluruh proses pembelian barang/jasa dari pemeriksaan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) hingga penyerahan barang/jasa yang diminta. Audit fisik merupakan bagian dari audit kepatuhan dan lebih efektif untuk mencegah timbulnya kecurangan.

(e) Audit Sistem Informasi,

Audit ini dimaksudkan untuk menyelidiki pengendalian internal sistem informasi dan penggunaan sistem oleh orang-orang. Pemeriksaan yang dilakukan berupa input, output, dan evaluasi sistem proses, rencana pencadangan dan pemulihan, sistem keamanan, dan peralatan sistem informasi. Audit dapat dilakukan pada sistem yang sudah ada atau yang baru dikembangkan.

2.2.3 Peranan Audit Internal

Menurut Fahmi, et al (2019), yang mengutip pendapat Kuntadi (2009) menjelaskan peranan audit internal adalah untuk membantu perusahaan dalam melakukan audit bagi kepentingan manajemen, memecahkan beberapa hambatan dalam sebuah organisasi dan mendukung upaya manajemen untuk membangun budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas. Tidak masalah seberapa baik audit internal menjalankan tugasnya, tetapi jika integritas manajemen tidak membantu manajemen dalam upayanya untuk memastikan bahwa rekomendasi audit internal dilakukan itu akan menjadi sia-sia.

2.2.4 Unsur- unsur Audit Internal

1. Independensi

Independensi dalam audit bukan merupakan suatu hak mutlak yang dapat dipaksa pelaksanaannya, melainkan suatu kewenangan yang perlu dipertahankan. Independensi adalah sikap tidak memihak, bebas dari benturan kepentingan dan obyektif dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar auditor dipercaya oleh masyarakat umum. Jika seorang auditor internal tidak dapat bersikap independen, maka akan sulit dalam upaya mencegah terjadinya *fraud*. Didukung dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 220 no.2 Per 1 Januari 2001, menyatakan bahwa independensi yaitu tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, karena bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

2. Kemampuan Profesional

Auditor internal dituntut untuk memiliki kualitas dan mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

Dengan demikian, bagian audit internal harus diisi oleh auditor yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kecakapan ilmu yang diperlukan dalam melakukan audit yang akurat. Menurut Tugiman (2003), dalam Fahmi, *et al* (2019)

kemampuan professional yang harus dimiliki oleh bagian audit internal adalah sebagai berikut :

1. Personalia
2. Pengetahuan dan Kecakapan
3. Pengawasan
4. Tanggungjawab dan Kewenangan

Audit Informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit internal haruslah mempunyai pertanggungjawaban dan laporan tersebut meliputi kewenangan audit yang dimiliki. Maka daripada itu, bagian audit internal haruslah mempunyai deskripsi tugas, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab, dan alur kegiatan audit. Hal ini sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) dalam Muhammad Fahmi, *et al* (2019), tentang tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab audit internal :“tujuan, kewenangan, tanggungjawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi”.

2.3 Pengendalian Internal

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern di definisikan sebagai berikut: “Sistem Pengendalian Intern mencakup organisasi dan seluruh metode dan ketentuan yg terkoordinasi yg dianut pada suatu perusahaan buat melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan & keandalan data akuntansi, menaikkan efisiensi usaha, serta mendorong pada taatinya

kebijakan manajemen yang sudah digariskan. Berikut ini adalah beberapa definisi pengendalian internal dari berbagai sumber menurut para ahli:

1. COSO (*Committee of Sponsoring Organization*)

COSO merupakan komite yang membuat kerangka konsep pengendalian internal yang banyak digunakan oleh perusahaan nasional maupun multinasional saat ini.

COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya melalui:

- a. efisiensi dan efektivitas produksi,
- b. penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku

2. IFAC (*International Federation of Accountants*)

IFAC mendefinisikan pengendalian internal adalah sistem yang dimiliki organisasi untuk manajemen risiko yang diterapkan, dipahami, dan dipantau oleh manajemen, manajemen dan karyawan untuk pencegahan laba rugi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

3. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Sedangkan menurut OJK, pengendalian internal merupakan sistem yang dikembangkan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Melindungi aset, menjaga keakuratan pencatatan akuntansi, menegakkan disiplin, dan meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.

Dari ketiga definisi tersebut, definisi pengendalian internal ini adalah suatu sistem yang dibuat oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mengatur segala

aktivitas yang ada di dalamnya guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan pengendalian internal bukan hanya pemilik atau pimpinan organisasi, namun seluruh anggota organisasi di dalamnya meskipun pada awalnya pengendalian internal dibuat dan diamanatkan oleh dewan direksi atau pimpinan.

Perum BULOG menggunakan Pengendalian Internal IFAC (*International Federation of Accountants*), untuk mengurangi serta mencegah adanya kecurang yang terdapat di Perum BULOG adanya tujuan meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan sumber daya perusahaan. Untuk meningkatkan tujuan organisasi Perum BULOG.

Sedangkan konsep dasar dari struktur pengendalian internal, antara lain sebagai berikut:

1. Dilakukan dan merupakan tanggung jawab manajemen. Meskipun pengendalian internal melibatkan seluruh anggota dalam organisasi, secara struktural pihak manajemen yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pengendalian internal.
2. Memberikan kepercayaan dan kepastian yang wajar namun tidak absolut. Hal ini dilakukan oleh manajemen karena mempertimbangkan beberapa faktor kebutuhan, biaya, dan tujuan tujuan tertentu.
3. Terdapat keterbatasan, yaitu pengendalian internal tidak selalu bisa efektif namun tergantung dengan kompetensi dan keandalan pelaksanaannya.

4. Sistem pengolahan data akan sangat berguna untuk bisa lebih mengembangkan informasi terkait pengendalian internal.

Menurut Wakhyudi (2018:18) Pengendalian Internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Suginam (2016), dalam Hajat, Prasetya (2021), “Pengendalian internal merupakan suatu sistem yg mencakup berukuran-berukuran yg dipatuhi beserta buat menjaga semua harta kekayaan organisasi menurut aneka macam arah dan struktur organisasi bersama seluruh mekanisme. Berdasarkan pengertian Pengendalian Internal pada atas, maka bisa disimpulkan bahwa Pengendalian Internal merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh orang-orang tertentu untuk di patuhi atau dijalankan oleh seluruh karyawan perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan.

2.3.1 Tujuan, Jenis, dan Unsur Pengendalian Internal

Tujuan utama pengendalian intern adalah untuk membantu perusahaan menangkap peluang dan keuntungan serta mencegah risiko kerugian, termasuk mencegah kecurangan karyawan seperti kecurangan administrasi dan keuangan.

Sedangkan tujuan lainnya dari pengendalian internal adalah:

1. Menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
2. Memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan.
4. Memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat.
5. Menjaga aset perusahaan.
6. Menjamin keamanan operasional perusahaan.

Ditinjau berdasarkan tujuannya, pengendalian internal dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu:

1. Pengendalian internal akuntansi, yaitu pengendalian yang meliputi persetujuan, keandalan data, pemisahan fungsi operasi, penyimpanan, pencatatan, hingga pengawasan aset atas kekayaan.
2. Pengendalian internal administrasi, yaitu pengendalian yang meliputi efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis risiko, manajemen sumber daya hingga pengendalian mutu.

Sedangkan ditinjau dari unsur yang terdapat dalam pengendalian internal, di dalamnya terdapat beberapa unsur antara lain:

1. Struktur yang mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas dan tegas. Sebagai contoh, dalam akuntansi harus ada dua orang yang bertugas secara berbeda yaitu orang yang bertugas menerima transaksi dan orang yang bertugas mencatat transaksi keuangan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan unsur laporan keuangan. Contohnya pengendalian internal terhadap kas perusahaan.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi unit secara sehat. Contohnya memberikan hak cuti (wajib) bagi karyawan secara berkala dan aktivitas audit administrasi.
4. Mutu karyawan yang kompeten untuk mengemban tanggung jawab. Misalnya dengan menciptakan dan membangun tata kelola karyawan yang baik mulai dari seleksi hingga pengembangan karyawan.

2.3.2 Komponen Pengendalian Internal

Terdapat 5 (lima) komponen pengendalian internal sebagaimana yang telah disempurnakan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencakup seluruh aspek yang membentuk perilaku, struktur, standar, dan kebijakan yang mengatur operasional perusahaan. Terdapat beberapa hal yang memengaruhi lingkungan pengendalian internal yaitu:

- a) Filosofi dan gaya operasional manajemen.
- b) Integritas, nilai-nilai dan kode etik perusahaan.
- c) Komitmen pada kompetensi.
- d) Struktur organisasi.
- e) Praktik administrasi dan personalia.
- f) Kebijakan operasional

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk membentuk elemen lain dari pengendalian internal lain yang baik. Sebagai contoh adalah kebijakan operasional terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terkait tata kelola, pengembangan, pelatihan, atau evaluasi jabatan. Tanpa dukungan dengan kebijakan yang baik, sulit bagi perusahaan untuk memiliki SDM unggul yang memiliki kompeten sesuai dengan tujuan perusahaan.

2. Penilaian Risiko

Setiap aktivitas memiliki risiko termasuk aktivitas operasional maupun produksi perusahaan. Baik risiko yang berkaitan dengan bisnis secara langsung maupun tidak. Di mana pada tahap awal, perusahaan menilai risiko yang akan dihadapi dengan melakukan manajemen risiko yang terdiri dari analisis, tindakan, dan evaluasi. Penilaian risiko berkaitan dengan proses pencapaian tujuan perusahaan. Dengan memitigasi risiko, perusahaan bisa lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan; mendapatkan keuntungan maksimal dan mengurangi kerugian. Di antara risiko yang mungkin harus dihadapi oleh perusahaan adalah risiko perubahan hukum, situasi politik dan ekonomi, internal fraud, ancaman pesaing, hingga anomali permintaan pasar.

3. Prosedur Pengendalian

Dalam pelaksanaan pengendalian harus berpedoman pada prosedur atau pedoman yang telah ditetapkan. Agar proses pelaksanaan pengendalian benar-benar sesuai pada koridor yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Prosedur atau pedoman dalam pelaksanaan pengendalian juga harus bisa menjadi alat pendeteksi kemungkinan adanya tindak kecurangan dalam aktivitas perusahaan. Sesuai

dengan unsur-unsur pengendalian internal secara umum. prosedur pengendalian internal meliputi; karyawan yang berkompotensi rotasi keria dan kewajiban cuti pemisahan fungsi dan berkompotensi, rotasi kerja dan kewajiban cuti, pemisahan fungsi dan tanggung jawab, ulasan kinerja, serta perlindungan aset dan data akuntansi.

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan, manajemen perusahaan juga bisa melakukan identifikasi langkah-langkah dan proses mana yang dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan. Pengawasan dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, penilaian khusus atau audit internal keuangan. Kedua, mengidentifikasi adanya sinyal peringatan yang berhubungan dengan perilaku karyawan dan/atau sistem akuntansi. Sebagai contoh adalah adanya perubahan perilaku karyawan, atau adanya transaksi pada sistem akuntansi yang tidak wajar.

5. Informasi dan Komunikasi

Komponen informasi dan komunikasi juga memiliki peranan penting sebagaimana elemen-elemen lain. Tanpa adanya data dan informasi yang memadai, proses pengendalian yang dimulai dari pembentukan kebijakan, analisis risiko, hingga pengawasan cukup sulit untuk bisa dilakukan dengan baik. Informasi dan komunikasi juga bisa digunakan untuk menilai suatu kejadian atau kondisi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pelaporan.

2.3.3 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang bersifat terbatas merupakan salah satu kekurangan tersendiri dalam pengendalian. Efektivitas sistem pengendalian sangat bergantung pada sifat dan dukungan manajemen dan faktor-faktor lainnya. Artinya dengan keberadaan dan peran pengendalian internal tidak secara ajaib mampu mengubah sistem manajemen atau keberhasilan perusahaan. Keterbatasan lainnya yang sulit untuk dikendalikan oleh sistem pengendalian internal antara lain:

- a. Hubungan nepotisme dalam membangun sistem pengendalian yang sering kali menimbulkan ketidakadilan pada karyawan perusahaan
- b. Praktik kolusi yang dilakukan oleh sekelompok orang baik konsumen, sesama karyawan maupun vendor yang bekerja sama untuk melakukan kecurangan.
- c. Anomali kebijakan pemerintah dan kondisi sosial-politik-budaya di wilayah atau negara tempat perusahaan berada.
- d. Tindakan pesaing yang di luar kontrol perusahaan.
- e. Perubahan perilaku konsumen, contohnya konsumen tidak mau lagi membeli produk perusahaan karena nilai manfaatnya yang berkurang.
- f. Dan hal-hal lain yang berada di luar kontrol perusahaan.

2.4 Pencegahan Kecurangan (fraud)

Untuk mendeteksi fraud seorang auditor internal maupun eksternal harus proaktif pada saat melakukan audit, baik audit secara umum maupun khusus dengan berupaya melihat kelemahan kelemahan dalam sistem pengendalian intern, terutama yang berkenaan dengan perlindungan terhadap aset yang rawan akan

terjadinya *fraud*, ini adalah bagian dari keahlian yang harus dimiliki oleh seorang auditor apabila dari audit umum diperoleh adanya temuan audit atau ada tuduhan dari pihak lain atau ada keluhan, auditor harus bersikap reaktif menanggapi temuan, tuduhan atau keluhan tersebut, auditor bereaksi menanggapi temuan audit, tuduhan dan keluhan dan mendalaminya dengan audit investigasi. Audit investigasi dimulai saat ditemukan indikasi awal adanya *fraud* audit investigasi merupakan bagian dan titik awal dari akuntansi forensik.

Menurut Hajat, Prasetya (2021) adalah sebagai berikut: “Pencegahan *fraud* adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku.”

2.4.1 Pengertian fraud di dalam KUHP

- 1) Membawa seluruh dari suatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain, memaksa orang lain untuk memberikan seluruh atau sebagian dari barang tersebut kepada orang lain. Atau untuk menghapus hutang dan piutangnya.
- 2) Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain tetapi tidak dengan melakukan kejahatan

3) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapus piutangnya.

4) Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

Fraud dapat diartikan sebagai rangkaian kata-kata yang melanggar hukum yang disengaja/kegiatan ilegal dan merugikan orang lain. Perbuatan merugikan tersebut dapat berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kecurangan penyelewengan, penipuan, pencurian, penyuapan, manipulasi, penggelapan, penjarahan, penipuan, penyelundupan, dan penyesatan. Perbuatan yang secara keseluruhan menyimpang dari etika dan martabat atau penyalahgunaan. Pada dasarnya terdapat empat faktor pendukung seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebut juga dengan teori gone yaitu:

G: *greed*(keserakahan)

O: *opportunity* (kesempatan)

N : *need* (kebutuhan)

E: *exposure*(pengungkapan)

Greed dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan atau disebut sebagai faktor individu , sedangkan faktor *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban pembuatan kecurangan yang disebut faktor generik. Faktor pengungkapan berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkap nya suatu kecurangan dan sifat serta puasnya hukuman terhadap pelaku kecurangan dapat diungkap atau

ditemukan, akan semakin kecil kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut, karena pada dasarnya seseorang pelaku kecurangan kalau perbuatannya tersebut dapat diketahui oleh orang lain.

Secara skematis, *association of certified fraud examiner* (ACFE) menggambarkan occupational front dalam bentuk fraud tree. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja beserta ranting-rantingnya. *Occupational fraud tree* ini mempunyai 3 cabang utama yakni *corruption*, *asset misappropriation and fraudlement statm*.

2.4.2 Cabang-cabang Fraud

1. *Corruption*

a. *Conflict of interest*

Merupakan benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini bias terjadi dalam skema permainan pembelian maupun penjualan. Pembeli dapat melakukan kolusi korupsi nepotisme dengan penjualan. Lembaga pemerintah atau bisnis baik selaku penjual maupun pembeli dapat melakukan KKN. Praktek ini mencolok dalam hal pembeli sebenarnya merupakan captive market dari penjual, namun penjual tetap mengeluarkan marketing fee yang tidak lain adalah penyuapan.

b. Bribery (penyuapan)

c. Illegal gratuities

d. Pemberian hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan

e. *Economic extortion*

2. *Asset Misappropriation*

Pembagian harta secara tidak sah oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau menguasai harta tersebut (penggelapan). Cabang-cabang dari penggelapan ini adalah:

a. *Cash*

Jadi sasaran penjarahan adalah uang kas maupun di bank yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pelakunya. Asset Misappropriation dalam bentuk penjarahan khas dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu :

- *Larceny*
- *Fraudulent disbursement*
- *Skimming*

b. *Inventory and all other assets*

Aset lainnya juga bisa menjadi sasaran adalah aktiva tetap modus operandi dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah *missue* dan *larceny missue* adalah penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tetapi jika apa yang disalahgunakan tersebut tidak dikembalikan maka dikatakan sebagai *larceny*.

3. *Fraudulent statments*

Terbagi atas :

a) *Financial*

Sengaja salah mengartikan atau menghilangkan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan, menyebabkan konsekuensi yang tidak menguntungkan dalam laporan keuangan. Jenis *fraud* itu sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit. Ini merupakan *fraud*

yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan salah saji, misstatements baik *overstatements* maupun *understatements*, salah saji aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya terlihat dalam banyak perusahaan publik raksasa di Amerika Serikat seperti Enron, undang-undang Sarbanes Oxley merupakan ketentuan yang keras terhadap praktek-praktek tersebut.

b. Non finansial

Penyajian laporan keuangan yang keliru mengalahkan fakta dan seringkali merupakan pemalsuan atau penggambaran yang keliru dari keadaan. Bisa dicantumkan dalam file untuk keperluan internal atau eksternal. Misalnya perusahaan yang mengklaim tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi masyarakat, keadaan tersebut ternyata bukanlah keadaan yang sebenarnya.

2.4.3 Mencegah *Fraud*

1. Tingkatkan pengendalian intern

Pengendalian internal khusus untuk penanganan suatu *fraud* adalah sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus yang dirancang dan diterapkan untuk tujuan utama, jika bukan satu-satunya, untuk mencegah dan menghalangi terjadinya penipuan. Pengendalian internal aktif (pencegahan) merupakan bentuk pengendalian yang paling banyak digunakan. Alat ini sering digunakan dan diakui secara universal dalam sistem akuntansi, seperti tanda tangan, PIN dan kata sandi, pemisahan tugas dan fungsi, kontrol aset fisik, pencocokan dokumen, dan formulir kewajiban yang telah direkam sebelumnya.

Pengendalian intern pasif, dalam pengendalian ini dari permukaan terlihat tidak ada pengamanan, tetapi memiliki peredam yang menghalangi pelanggar atau penipu. Bentuk-bentuk pengendalian intern pasif adalah pengendalian khas untuk masalah yang dihadapi, jejak audit, audit yang fokus, pengintai atas kegiatan kunci, dan pemindahan tugas.

2. Menanamkan kesadaran tentang adanya fraud
3. Upaya menilai risiko terjadinya fraud
4. Lakukan seleksi pegawai secara ketat gunakan tenaga psikolog.
5. Berikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai dan timbulkan *sense of belonging*
6. Lakukan pembinaan rohani
7. Berikan sanksi yang tegas bagi yang melakukan kecurangan dan berikan prestasi bagi pegawai yang berprestasi.

2.4.4 Penyebab *Fraud*

- a) Suatu tekanan atau suatu dorongan untuk melakukan kecurangan
- b) Suatu peluang yang dirasakan ada untuk melaksanakan kecurangan

Dalam audit umum, auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi *fraud*:

- 1) Dalam perencanaan audit, auditor harus menaksir risiko salah saji akibat *fraud*, dan mempertimbangkan risiko tersebut dalam merancang prosedur audit nya.
- 2) Bersikap professional *skepticism*

Tanggung jawab auditor dalam melakukan fraud yaitu, Bila terdapat bukti terjadinya minor fraud, dilaporkan kepada level manajemen yang lebih tinggi dari

level di mana terjadinya fraud. Surat yang melibatkan manajemen senior atau berbagai level manajemen dan menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan., Harus dilaporkan kepada komite audit dan dan atau dewan komisaris. Meskipun kecurangan biasanya disembunyikan, adanya faktor risiko atau kondisi lain dapat memperingatkan auditor tentang kemungkinan adanya kecurangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada Pt Pln (Persero) Bagian Wilayah Sumatera Barat), 2020	Fikri Aditya, Annisa Nurbaiti, S.E., M.Si.	Audit Internal (X1), Pengendalian Internal (X2), Pencegahan Kecurangan (Y)	Hasil Pengujian Hipotesis Ini Menunjukkan Bahwa Secara Simultan Atau Secara Bersama-Sama Kedua Variabel Tersebut Juga Menunjukkan Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Pencegahan Kecurangan. Sedangkan Secara Parsial Audit Internal Dan Pengendalian Internal Menunjukkan Bahwa Adanya Pengaruh Signifikan Terhadap Pencegahan Kecurangan.
2.	Pengaruh Pelaksanaan Audit	Diana Maryana,	Audit Internal (X1), Good	Bahwa Audit Internal

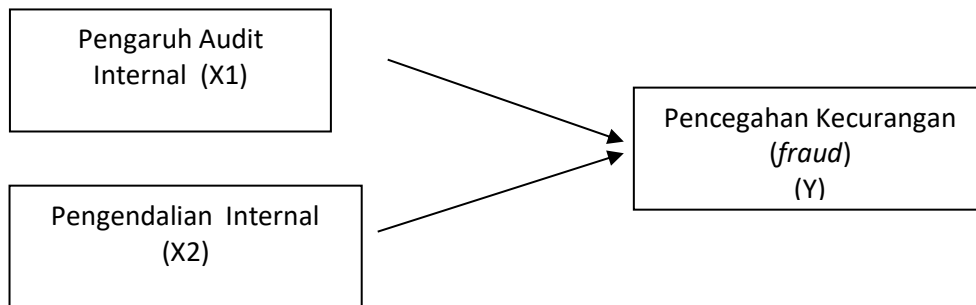
	Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Pada Kantor Pusat Pt Pos Indonesia (Persero) Bandung, 2020	Se., M.Si., Nurafizah Hasibuan	Corporate Governance (Y)	Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Good Corporate Governance (Gcg).
3.	Pengaruh Audit Internal Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Bank Bumn Di Denpasar, 2021	Komang Yoga Mahendra, A. A. A Erna Trisnadewi Dan Gusti Ayu Intan Saputra Rini	Audit Internal (X1), Efektivitas Pengendalian Internal (X2), Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Y).	Hasil Uji Hipotesis Statistik T Diketahui Bahwa Audit Internal Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Bumn Di Denpasar, Otoritas Berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Bumn Di Denpasar. Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis F Menjelaskan Bahwa Variabel Audit Internal Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Variabel Pencegahan Kecurangan Pada Bank Bumn Di Denpasar.
4.	Pengaruh Peranan Audit Internal Dan Pengendalian	Saipul Hajar, Eka Rima	Audit Internal (X1), Pengendalian	Membuktikan Bahwa Peran Internal Audit Dan

	Internal Terhadap Pencegahan Fraud, 2021.	Prasetya	Internal (X2), Pencegahan <i>Fraud</i> (Y).	Internal Control Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud. Secara Parsial, Peran Audit Internal Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud. Audit Internal Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Memegang Peranan Penting Dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan. Sedangkan Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud, Hal Ini Membuktikan Bahwa Pengendalian Internal Dalam Perusahaan Merupakan Bagian Yang Sangat Penting Dalam Mencegah Fraud.
5.	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kompetensi Terhadap	Mufidah, Masnun	Pengendalian Internal (X1), Kompetensi (X2), Pencegahan Kecurangan (Y)	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pengendalian Internaldan

	Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, 2021			Kompetensi Memiliki Pengaruh Pada Pencegahan Penipuan
6.	Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan PT POS Indonesia Kota Metro Lampung, 2022	Gloria, Arisman	Audit Internal (X1), Pengendalian Internal (X2), Pencegahan <i>Fraud</i> (Y).	Hasil penelitian berdasarkan uji parsial (T) menunjukkan bahwa audit internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar Kerangka Konseptual

2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan kecurangan (*fraud*)

Semakin meningkatnya masalah di Perum BULOG wilayah Lampung membutuhkan karyawan yang dapat mendukung manajer. Ini dikenal sebagai Audit Internal dan biasanya dipimpin oleh seorang Auditor. Bagian ini dipimpin langsung oleh Direktur Internal Audit, yang mengarahkan personil dan aktivitas departemen audit intern & mempunyai tanggungjawab terhadap program dan pelatihan staff audit. Hampir semua instansi pemerintah dan swasta menggunakan fungsi audit internal untuk melihat bagaimana masing-masingdepartemen dalam perusahaan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan *job description-nya*. Fungsi audit internal Mengenali dan meminimalkan risiko. Dukungan manajemen dan dukungan di bidang teknis. Proses audit adalah proses yang sangat penting bagi perusahaan. Pelaksanaan proses audit merupakan bukti bahwa dokumen yang ada benar-benar sesuai

dengan kenyataan. Selain itu, proses ini merupakan cara untuk memastikan bahwa semua aset perusahaan berada pada posisi yang aman dan tidak ada ancaman eksternal maupun internal terhadap perusahaan itu sendiri.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Gloria, Arisman (2022), Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. Audit internal yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan akan mengurangi terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) bahkan dapat mencegah terjadinya *fraud*.

H1 : Audit Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

2.7.2 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Setiap perusahaan atau perusahaan wajib menerapkan suatu sistem untuk mengatur kegiatan operasionalnya. Salah satu sistem yang dapat digunakan untuk manajemen adalah sistem pengendalian intern. Jika sistem yang baik beroperasi, perusahaan dapat menghindari risiko seperti penipuan yang dapat merugikan perusahaan. Menurut AICPA (*The American Institute of Certified Public Accountants*), pengendalian internal ialah rencana organisasi dan segala cara yang diterapkan oleh suatu perusahaan untuk melindungi aset (harta kekayaan), Menjaga akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mematuhi kebijakan manajemen perusahaan. Mulyadi (2017:130) berpendapat bahwa elemen utama sistem pengendalian internal memiliki empat elemen, yaitu: (1) struktur organisasi dengan pembagian tanggung jawab secara jelas. (2) Sistem

otorisasi dan prosedur pencatatan. (3) praktik yang sehat, (4) karyawan yang kualitasnya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Gloria, Arisman (2022), Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. Pengendalian internal yang tinggi dalam suatu perusahaan memungkinkan untuk mencegah terjadinya *fraud* pada perusahaan tersebut tetapi jika pengendalian internal dalam suatu perusahaan rendah maka potensi melakukan kecurangan akan lebih tinggi.

H2 : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)